Katalog : 9302020.3521

2016 - 2020

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN NGAWI
MENURUT PENGELUARAN

https://ngawikab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NGAWI

https://ngawikab.bps.go.id

2016 - 2020

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN NGAWI
MENURUT PENGELUARAN

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN NGAWI MENURUT PENGELUARAN 2016-2020

ISSN 2685-8134
Nomor Publikasi : 35210.2103
Katalog BPS : 9302020.3521

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : x + 75 halaman

Naskah:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi

Gambar Kulit:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi

Diterbitkan Oleh:
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi

Dicetak oleh :
CV. Azka Putra Pratama

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

https://ngawikab.bps.go.id

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum :

Ir. Prayogo Setyo Widodo M.M

Penyunting :

Ambar Budhi Setyo, SE

Penulis dan Pengolah Data :

Harisman

Desain Kover :

Harisman

https://ngawikab.bps.go.id

https://ngawikab.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas PDRB menurut pengeluaran/permintaan akhir, yang dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

https://ngawikab.bps.go.id

Kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Ngawi, April 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Ngawi,

Ir. Prayogo Setyo Widodo, M.M
NIP. 19650922 199403 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN ix
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 3
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB 6
BAB II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA 11
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) 13
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT) 15
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P) 17
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 20
2.5. Perubahan Inventori (PI) 23
2.6. Ekspor – Impor 26
BAB III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN NGAWI BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2016-2020 29
3.1. Perkembangan PDRB Pengeluaran 31
3.2. Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran 39
3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga 40
3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT 45
3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah 46
3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 49
3.2.5. Perubahan Inventori 50
3.2.6. Ekspor Neto 52
BAB IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016-2020 55
4.1. Produk Domestik Regional Bruto (Nominal) 57
4.2. Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB 58
4.3. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 58
PENUTUP 61
LAMPIRAN 65
DAFTAR PUSTAKA 73

https://ngawikab.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Ngawi, 2016-2020 32
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Kabupaten Ngawi, 2016-2020 33
Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Ngawi 2016-2020 35
Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Kabupaten Ngawi 2016-2020 37
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Ngawi 2016-2020 38
Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Ngawi 2016-2020 39
Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Ngawi 2016-2020 41
Tabel 8. Struktur Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Ngawi 2016-2020 43
Tabel 9. Laju Implisit PDRB Kelompok Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Ngawi 2016-2020 44
Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT di Kabupaten Ngawi 2016-2020 45
Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Ngawi 2016-2020 47
Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Ngawi 2016-2020 49
Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Ngawi 2016-2020 51
Tabel 14. Perkembangan Ekspor Neto Kabupaten Ngawi 2016-2020 53
Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Ngawi 2016-2020 57
Tabel 16. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Ngawi 2016-2020 58
Tabel 17. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Ngawi 2016-2020 59

https://ngawikab.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Ngawi 2016-2020 32
Gambar 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Kabupaten Ngawi, 2016-2020 34
Gambar 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Kabupaten Ngawi 2016-2020 34
Gambar 4. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Kabupaten Ngawi 2016-2020 36
Gambar 5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Kabupaten Ngawi 2016-2020 38

https://ngawikab.bps.go.id

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Ngawi, 2016-2020 67
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Ngawi, 2016-2020 68
Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Ngawi, 2016-2020 ... 69
Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Ngawi, 2016-2020 70
Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Ngawi, 2016-2020 71
Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Ngawi, 2016-2020 72

https://ngawikab.bps.go.id

https://ngawikab.bps.go.id

1

PENDAHULUAN

https://ngawikab.bps.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil "akhir" dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)[1]. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side)* dan sisi permintaan (*demand side)* barang dan jasa.

https://ngawkab.bps.go.id

[1] *Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung "neto" (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)*

Secara konsep[2], penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metode pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical descrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa *(output)* yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi "akhir" oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksukan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk "permintaan akhir". Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data

https://ngawikab.bps.go.id

[2] *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metode dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical descrepancy*) tersebut.

Penyusunan data PDRB Pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana "pendapatan" (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat[3], yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai **"output akhir (*final output*)"**. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

https://ngawkab.bps.go.id

$$\mathbf{Y = C + GFCF + \Delta\ Inventori + X - M}$$

Y (*Income*)	=	PDRB Produksi
C (*Consumption*)	=	Konsumsi akhir
GFCF (*Gross Fixed Capital Formation*)	=	Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	=	Perubahan Inventori
X	=	Ekspor
M	=	Impor

3. - *Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik*
   - *Disebut sebagai pendekatan "riil"*
   - *Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut*

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan "identik" dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai "ekspor neto" .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat terntang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan "riil", serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

https://ngawikab.bps.go.id

2.1. PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (*SNA*) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi

rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten Ngawi menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomi wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

https://ngawikab.bps.go.id

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
b. Meningkatkan kualitas PDRB;
c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun[4];
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

https://ngawikab.bps.go.id

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

[4] *SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"*

- Konsep dan Cakupan
  a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
  b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
  c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
  d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
  e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
  f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases,* yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun

https://ngawikab.bps.go.id

tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

  Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metode FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metode ini menggantikan metode *Imputed Bank Services Charge* (*IBSC*).

- Valuasi

  Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

  Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

https://ngawikab.bps.go.id

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 4. Perubahan Inventori 5. Ekspor 6. Impor	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 5. Perubahan Inventori 6. Ekspor 7. Impor

2

METODE ESTIMSI DAN SUMBER DATA

https://ngawikab.bps.go.id

BAB II
METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1.PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran[1]. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

https://ngawikab.bps.go.id

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan

[1] *Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai ekspornya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah*

7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

https://ngawikab.bps.go.id

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

v. Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metode sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas (untuk PK-RT Tahunan)

2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan);
3. Data poin 2 dikelompokan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:
Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

https://ngawikab.bps.go.id

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
c. Penyusutan
d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

https://ngawikab.bps.go.id

iv. Sumber Data

a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;

3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

https://ngawikab.bps.go.id

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumahtangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidentil dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam parktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

https://ngawikab.bps.go.id

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah Kabupaten Ngawi mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P Kabupaten Ngawi mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi; b). PK-P Kabupaten Ngawi yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P Kabupaten Ngawi.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P Kabupaten Ngawi tahunan adalah:

a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementrian Keuangan dan Bappeda
b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementrian Keuangan dan Bappeda
e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

https://ngawikab.bps.go.id

v. Metode Estimasi

Komponen PK-P Kabupaten Ngawi Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

PK-P atas dasar harga Berlaku = Output – Penjualan barang dan jasa +
Social transfer in kind purchased market production +
Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakaan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

https://ngawikab.bps.go.id

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources*/CBR). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli

(*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

a. Output industri konstruksi, BPS
b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS

https://ngawikab.bps.go.id

j. Data Eksplorasi Mineral, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metode estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metode Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM +Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

https://ngawikab.bps.go.id

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metode Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar hargak (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5. PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress)*, serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

https://ngawikab.bps.go.id

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;

b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;

c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;

d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);

e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;

f. Ternak untuk tujuan dipotong;

g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta

h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

https://ngawikab.bps.go.id

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau metode deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume nventori (t) – Volume inventori (t-1)) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

https://ngawikab.bps.go.id

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) - Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

2.6. EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

https://ngawikabbps.go.id

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah Kabupaten Ngawi terdiri dari:

a. Ekspor ke luar provinsi/Kabupaten Ngawi
b. Impor dari luar provinsi/Kabupaten Ngawi.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Ekspor Neto.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah Kabupaten Ngawi didasarkan pada penghitungan Ekspor Neto. Namun sering kali untuk mengestimasinya tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Ekspor Neto Kabupaten Ngawi diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Ekspor Neto menjadi ekspor dan impor dengan mengunakan metode tidak langsung.

https://ngawikab.bps.go.id

https://ngawikab.bps.go.id

3

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN NGAWI

https://ngawikab.bps.go.id

BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN NGAWI BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2016-2020

3.1. PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru yakni tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar yang digunakan sebelumnya yaitu tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (*SNA*) 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDRB tersebut.

Nilai PDRB ADHB Kabupaten Ngawi selama kurun waktu 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, PDRB ADHB Kabupaten Ngawi mencapai 16.529.645,4 juta rupiah. Dalam rentang 5 tahun, nilai tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai 20.270.971,9 juta rupiah pada tahun 2020. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh komponen pembentuknya mulai dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, PMTB, maupun ekspor impor.

Meskipun PDRB ADHB Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi lima tahun lalu, namun jika dibandingkan tahun 2019, nilai tersebut mengalami penurunan. Hal ini merupakan dampak dari Pandemi Covid-19 yang melanda selama tahun 2020.

PDRB atas dasar harga berlaku menurut komponen pengeluaran Kabupaten Ngawi pada periode 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 1 berikut ini:

https://ngawikab.bps.go.id

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Ngawi, 2016-2020

(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	11.759.276,05	12.687.262,35	13.665.622,54	14.617.209,81	14.468.060,47
2. Konsumsi LNPRT	196.178,93	206.360,81	217.972,54	229.365,78	234.522,32
3. Konsumsi Pemerintah	1.884.088,97	1.991.034,84	2.106.159,14	2.249.347,16	2.269.913,16
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.278.478,25	3.927.683,57	4.434.480,32	4.808.569,75	4.641.903,72
5. Perubahan Inventori	47.065,02	47.535,67	50.248,58	51.684,34	24.504,67
6. Ekspor Neto	(635.441,77)	(1.149.464,91)	(1.334.357,32)	(1.523.529,88)	(1.567.932,43)
Produk Domestik Regional Bruto	**16.529.645,44**	**17.710.412,32**	**19.140.125,79**	**20.432.646,96**	**20.270.971,90**

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

https://ngawikab.bps.go.id

Gambar 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Ngawi 2016-2020

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB dari segi volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

Nilai PDRB ADHK Kabupaten Ngawi dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, PDRB ADHK Kabupaten Ngawi mencapai 11.807.560,95 juta rupiah. Kemudian rentang lima tahun, nilai tersebut telah meningkat menjadi 13.479.742,47 juta rupiah pada tahun 2020. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan semakin bertambahnya volume ekonomi Kabupaten Ngawi. Namun, jika dibandingkan tahun 2019, nilai PDRB ADHK Kabupaten Ngawi mengalami penurunan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

https://ngawikab.bps.go.id

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Kabupaten Ngawi, 2016-2020

(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	8.731.628,03	9.113.937,01	9.527.920,62	9.965.776,16	9.779.428,14
2. Konsumsi LNPRT	134.768,63	137.478,83	140.833,31	144.832,98	145.073,45
3. Konsumsi Pemerintah	1.268.925,32	1.281.943,47	1.320.143,38	1.365.157,61	1.337.549,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.341.134,67	2.698.200,04	2.918.414,34	3.076.727,67	2.942.185,86
5. Perubahan Inventori	30.801,75	30.872,60	31.837,23	32.569,66	15.286,95
6. Ekspor Neto	(699.697,45)	(855.997,09)	(886.847,70)	(874.178,24)	(739.781,43)
Produk Domestik Regional Bruto	**11.807.560,95**	**12.406.434,85**	**13.052.301,19**	**13.710.885,85**	**13.479.742,47**

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Gambar 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Ngawi 2016-2020

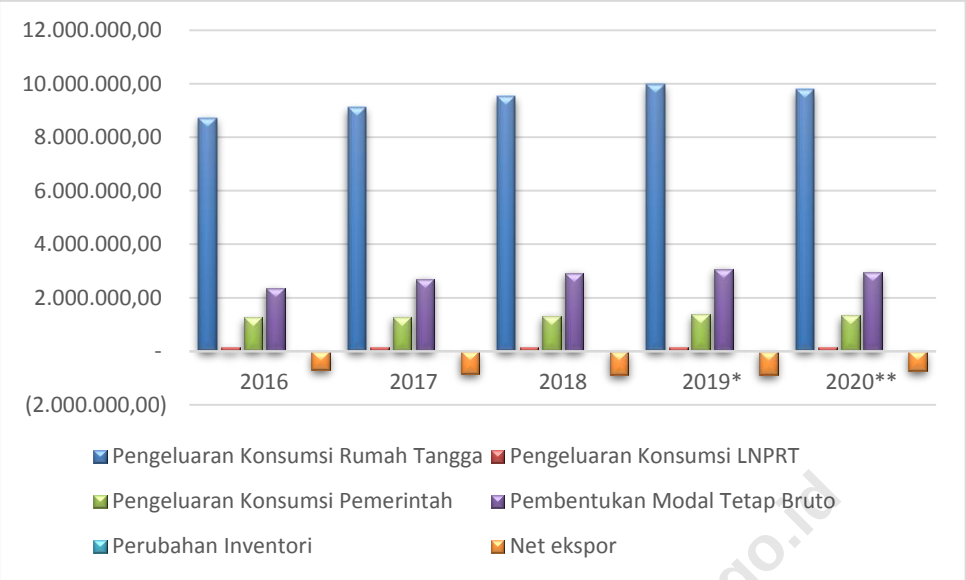

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Gambar 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Kabupaten Ngawi 2016-2020

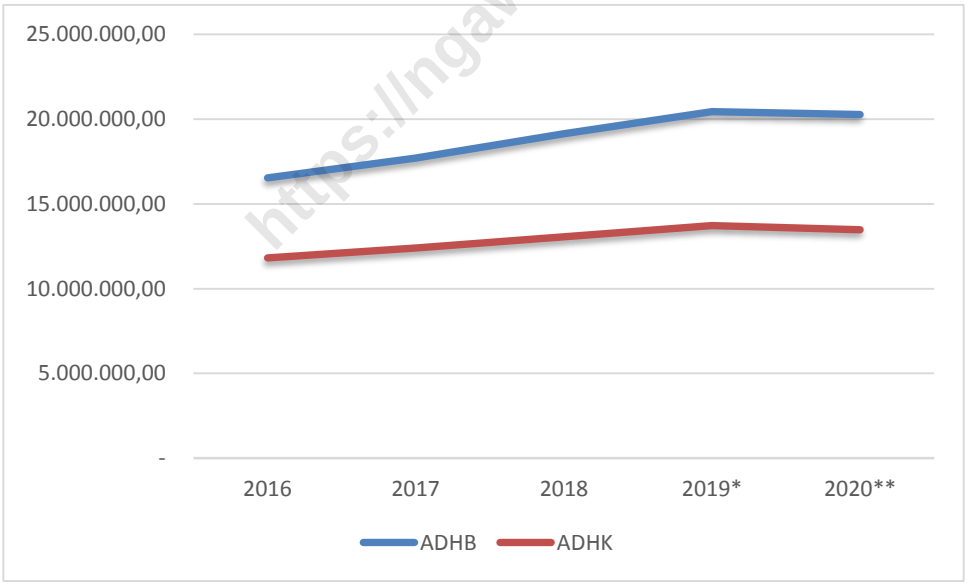

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Dari Gambar 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Sedangkan pada PRDB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya

https://ngawikab.bps.go.id

dengan PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor Neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Ngawi 2016-2020

(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	71,14	71,64	71,40	71,54	71,37
2. Konsumsi LNPRT	1,19	1,17	1,14	1,12	1,16
3. Konsumsi Pemerintah	11,40	11,24	11,00	11,01	11,20
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	19,83	22,18	23,17	23,53	22,90
5. Perubahan Inventori	0,28	0,27	0,26	0,25	0,12
6. Ekspor Neto	(3,84)	(6,49)	(6,97)	(7,46)	(6,75)
Produk Domestik Regional Bruto	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

https://ngawikab.bps.go.id

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2016-2020, PDRB Kabupaten Ngawi sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT). Pengeluaran untuk Konsumsi Rumahtangga berkontribusi hingga 71,37 persen total PDRB Kabupaten Ngawi tahun 2020. Konsumsi LNPRT pada tahun 2020 hanya sebesar 1,16 persen, hal ini antara lain disebabkan oleh belum banyaknya LNPRT yang aktif dan beroperasi pada skala besar di Kabupaten Ngawi.

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) selama periode 2016-2020 berada pada rentang 11,00 persen hingga 11,40 persen. Komponen konsumsi pemerintah (PK-P) mengalami kenaikan persentase sebanyak 0,19 persen saja dari tahun 2019 ke 2020, yakni dari 11,01 persen menjadi 11,20 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar.

Gambar 4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Ngawi 2016-2020

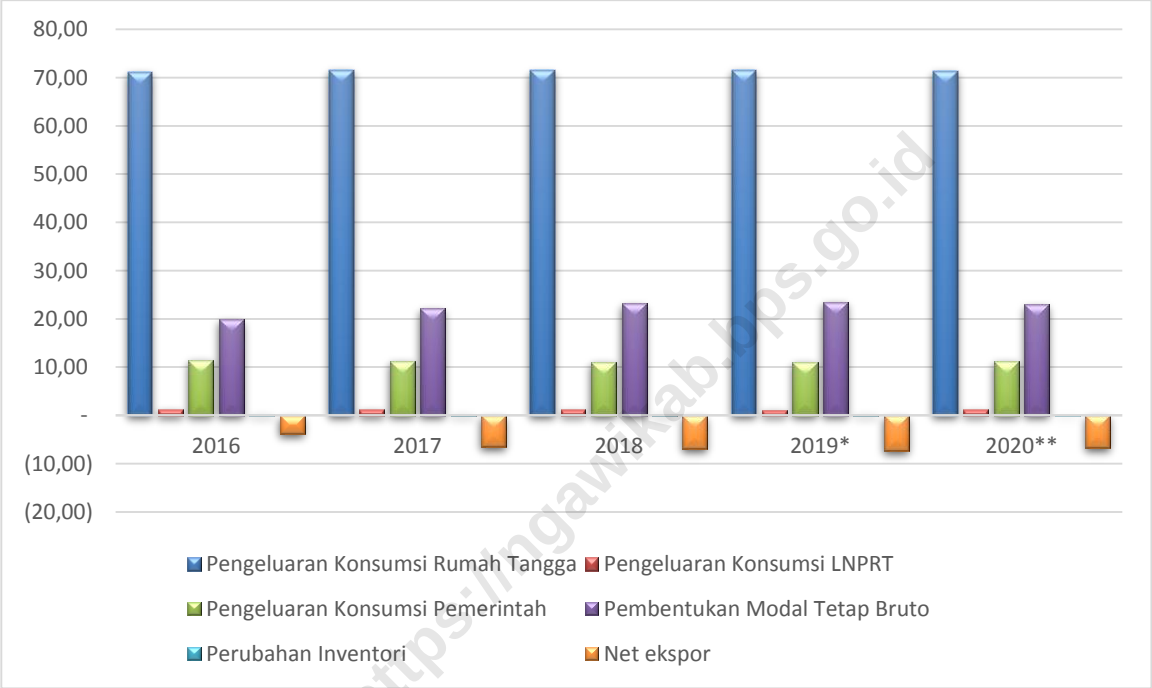

https://ngawikab.bps.go.id

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan bagian dari suatu proses investasi fisik secara keseluruhan berkontribusi sebesar 22,90 persen dari total PDRB Kabupaten Ngawi pada tahun 2020. Sementara itu, Kontribusi dari Ekspor Neto yang merupakan selisih komponen Ekspor dengan Impor bernilai negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari Tabel 4, selama periode tahun 2016-2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi

berada pada angka 5 persen, kecuali di tahun 2020, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,21 persen (2016); 5,07 persen (2017); 5,21 persen (2018); 5,05 persen (2019) dan -1,69 persen (2020). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dan 2018 yakni sebesar 5,21 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang mencapai -1,69 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 disebabkan oleh terhambatnya kinerja ekonomi akibat wabah Covid-19 yang menerpa berbagai wilayah di Indonesia, khususnya Kabupaten Ngawi. Gambar 5 menunjukkan pola pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing komponen pengeluaran selama lima tahun terakhir.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Kabupaten Ngawi 2016-2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	71,14	71,64	71,40	71,54	71,37
2. Konsumsi LNPRT	1,19	1,17	1,14	1,12	1,16
3. Konsumsi Pemerintah	11,40	11,24	11,00	11,01	11,20
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	19,83	22,18	23,17	23,53	22,90
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Neto	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	**5,21**	**5,07**	**5,21**	**5,05**	**-1,69**

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

https://ngawikab.bps.go.id

Gambar 5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Kabupaten Ngawi 2016-2020

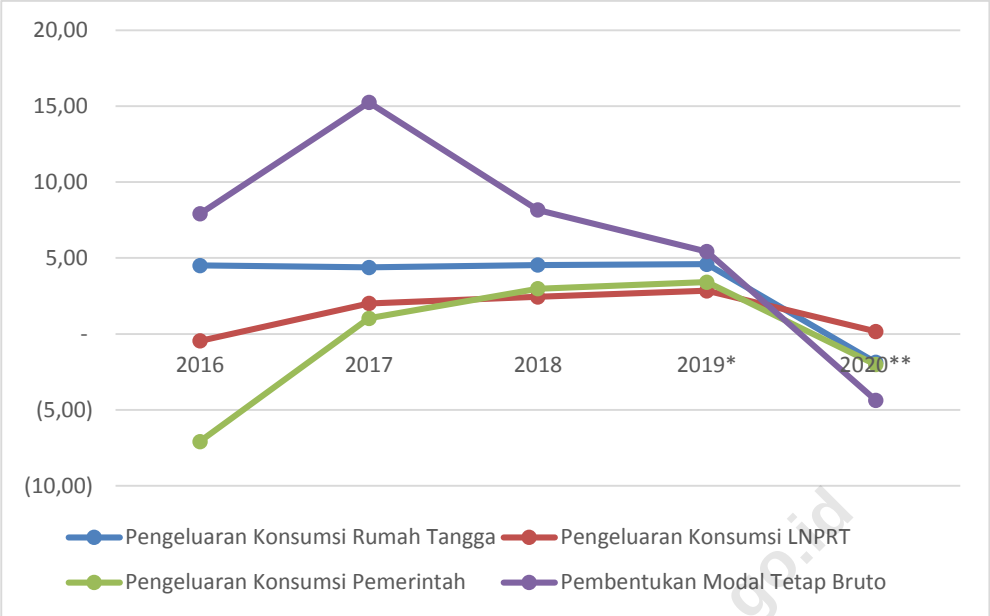

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

https://ngawikab.bps.go.id

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Ngawi 2016-2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	134,67	139,21	143,43	146,67	147,94
2. Konsumsi LNPRT	145,57	150,10	154,77	158,37	161,66
3. Konsumsi Pemerintah	148,48	155,31	159,54	164,77	169,71
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	140,04	145,57	151,95	156,29	157,77
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Neto	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	**139,99**	**142,75**	**146,64**	**149,02**	**150,38**

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Indeks implisit[1] PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumahtangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2016-2020, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen pengeluaran.

Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Ngawi 2016-2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,33	3,22	3,32	3,34	-1,36
2. Konsumsi LNPRT	-0,01	0,02	0,03	0,03	0,00
3. Konsumsi Pemerintah	-0,76	0,11	0,30	0,34	-0,20
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,57	3,32	1,82	1,22	-0,95
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	-	-	-	-	-
Pertumbuhan PDRB	**5,21**	**5,07**	**5,21**	**5,05**	**-1,69**

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

https://ngawikab.bps.go.id

3.2. PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik

[1] *Indeks perkembangan*

dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Ngawi untuk periode 2016-2020.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Ngawi ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Ngawi maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2016-2020 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga yang pada akhirnya, kenaikkan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama periode 2016-2020 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB cukup fluktuatif, yaitu 71,14 persen (2016); 71,64 persen (2017); 71,40 persen (2018); 71,54 persen (2019); dan 71,37 persen (2020). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 71,64 persen dan terendah pada tahun 2016 sebesar 71,14 persen. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 7.

https://ngawikab.bps.go.id

Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Ngawi 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Juta Rp)	11.759.276,0	12.687.262,3	13.665.622,5	14.617.209,8	14.468.060,5
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	8.731.628,0	9.113.937,0	9.527.920,6	9.965.776,2	9.779.428,1
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	**71,14**	**71,64**	**71,40**	**71,54**	**71,37**
Rata-rata Konsumsi per- Rumah Tangga					
a. ADHB (Juta Rp)	46,75	50,41	54,29	58,21	57,65
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	34,71	36,21	37,85	39,69	38,97
Rata-rata Konsumsi per- Kapita					
a. ADHB (Juta Rp)	14,18	15,29	16,46	17,61	17,43
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	10,53	10,98	11,48	12,01	11,78
Pertumbuhan *(%)*					
a. Total Konsumsi RT	4,50	4,38	4,54	4,60	-1,87
b. Per Rumahtangga	4,42	4,33	4,52	4,86	-1,81
c. Per Kapita	4,42	4,33	4,52	4,59	-1,87
Jumlah Rumahtangga (000)	**251,55**	**251,68**	**251,73**	**251,10**	**250,96**
Jumlah Penduduk (000 orang)	**829,48**	**829,90**	**830,09**	**830,11**	**830,13**

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

https://ngawikab.bps.go.id

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK selama periode 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan, namun mengalami kontraksi pada tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 4,60 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -1,87 persen. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi per kapita tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 4,59 persen dan terendah tahun 2020 sebesar -1,87 persen. Dalam kondisi normal, pada rentang 2016 hingga 2019 nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara "riil" lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen. Hal ini

mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini. Sementara itu, dalam kondisi pandemi, konsumsi rumah tangga terdampak signifikan sehingga mengalami penurunan. Hal ini turut berdampak pada penurunan konsumsi per kapita pada tahun 2020.

Pandemi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2020 berdampak pada terkontraksinya konsumsi rumah tangga pada tahun tersebut. Selama pandemi terjadi, masyarakat cenderung untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan primer dan menunda konsumsi kebutuhan sekunder ataupun tersier. Pengurangan konsumsi ini juga didorong oleh adanya indikasi penurunan pendapatan masyarakat sebagai akibat terhambatnya kinerja ekonomi serta ruang gerak masyarakat selama pandemi.

Rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh perubahan nilai konsumsinya. Pertumbuhan ratarata konsumsi per kapita selama tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan, baik ADHB maupun ADHK 2010, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa, pada periode sebelum ada Pandemi Covid-19, rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per kapita secara "riil" dalam rentang periode 2016 hingga 2019 berkisar antara 4,33 persen hingga 4,59 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga. Namun, semenjak wabah virus Covid-19 melanda Kabupaten Ngawi, mulai pada akhir kuartal pertama tahun 2020, rata-rata konsumsi per kapita tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar -1,87 persen.

Sementara itu, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2019, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2016, secara umum setiap rumah tangga di Kabupaten Ngawi menghabiskan dana sekitar 46,75 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dan sebagainya). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi

https://ngawikab.bps.go.id

50,41 juta rupiah (2017); 54,29 juta rupiah (2018); dan 58,21 juta rupiah (2019) kemudian turun menjadi 57,65 juta rupiah (2020).

Apabila ditinjau berdasarkan harga konstan 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran -2 sampai 5 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 4,86 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -1,81 persen. Adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga pada tahun 2020 terkontraksi.

Tabel 8. Struktur Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Ngawi 2016-2020

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	34,63	33,85	33,28	32,84	34,55
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,82	2,81	2,78	2,76	2,79
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	9,77	9,69	9,62	9,59	10,27
d. Kesehatan & Pendidikan	5,64	5,76	5,82	5,81	6,34
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	26,34	26,87	27,53	28,12	24,00
f. Hotel & Restoran	15,77	16,02	15,97	15,92	16,58
g. Lainnya	5,03	5,01	5,00	4,96	5,46
Total Konsumsi Akhir Rumah Tangga	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

https://ngawikab.bps.go.id

Struktur konsumsi rumah tangga Kabupaten Ngawi berdasarkan kelompok konsumsi didominasi oleh konsumsi bukan makanan. Dalam periode 2016 hingga 2020, porsi konsumsi bukan makanan selalu lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Porsi konsumsi non makanan berada pada kisaran 65 hingga 67 persen, dan sisanya adalah konsumsi makanan (32-34 persen). Secara lebih detail, proporsi konsumsi makanan untuk setiap tahunnya adalah 34,63 persen (2016); 33,85 persen (2017); 33,28 persen (2018); 32,84 persen (2019) dan 34,55 persen (2020).

Sementara itu, proporsi pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan menunjukkan bahwa konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Ngawi sebagian besar berada pada kelompok konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya. Porsi konsumsi pada kelompok ini berada pada kisaran 24 hingga 28 persen dari total konsumsi akhir rumah tangga.

Pola proporsi konsumsi tersebut, menunjukkan adanya tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting akibat adanya perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut diantaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 9. Laju Implisit PDRB Kelompok Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Ngawi 2016-2020

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,01	2,66	2,78	2,40	1,42
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,32	3,22	2,35	1,48	1,45
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,99	2,72	2,56	1,91	2,29
d. Kesehatan & Pendidikan	3,36	4,70	3,67	2,12	2,05
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,77	3,44	3,42	2,65	-2,98
f. Hotel & Restoran	5,14	4,91	3,12	2,03	2,15
g. Lainnya	4,03	3,69	3,91	2,12	2,24
Pengeluaran Akhir Konsumsi Rumahtangga	**3,94**	**3,37**	**3,03**	**2,26**	**0,87**

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

https://ngawikab.bps.go.id

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT di Kabupaten Ngawi 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT (Juta Rp)					
ADHB	196.178,93	206.360,81	217.972,54	229.365,78	234.522,32
ADHK 2010	134.768,63	137.478,83	140.833,31	144.832,98	145.073,45
Proporsi terhadap PDRB (%) ADHB	**1,19**	**1,17**	**1,14**	**1,12**	**1,16**

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

https://ngawikab.bps.go.id

Selama periode tahun 2016-2020, konsumsi LNPRT baik secara ADHB maupun ADHK 2010 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 konsumsi LNPRT atas dasar harga berlaku mencapai 196,18 miliar rupiah kemudian meningkat menjadi 206,36 miliar rupiah (2017); 217,97 miliar rupiah (2018); 229,36 miliar rupiah (2019) dan 234,52 miliar rupiah (2020). Demikian pula dengan konsumsi LNPRT yang dinilai atas dasar harga konstan 2010 juga mengalami peningkatan. Konsumsi LNPRT ADHK pada tahun 2016 mencapai 134,76 miliar rupiah kemudian meningkat menjadi 137,47 miliar rupiah (2017); 140,83 miliar rupiah (2018); 144,83 miliar rupiah (2019) dan terus meningkat hingga mencapai 145,07 miliar rupiah pada tahun 2020.

Proporsi konsumsi LNPRT dalam rentang waktu lima tahun terakhir relatif kecil, dengan kontribusi di bawah dua persen. Proporsi konsumsi LNPRT terhadap PDRB Kabupaten Ngawi pada tahun 2016 hingga 2019 relatif stabil dengan kisaran 1,12 sampai 1,19 persen. Selanjutnya, kontribusi LNPRT terhadap PDRB tahun 2020 mengalami peningkatan, dari 1,12 persen (2019) menjadi 1,16 persen (2020). Peningkatan ini

didorong oleh kegiatan partai politik selama rangkaian pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Selain itu, kegiatan berbagai lembaga kemanusiaan selama masa pandemik Covid-19 juga turut berpengaruh pada tingkat konsumsi LNPRT pada tahun tersebut.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam hal jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah pada tahun 2020 menunjukan peningkatan secara atas dasar harga berlaku, sedangkan secara atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 2.269.913,16 juta Rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 1.337.549,50 juta Rupiah. Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB Kabupaten Ngawi menurun pada kurun waktu 2016-2018, kemudian naik kembali di tahun 2019-2020. Adapun kontribusi konsumsi pemerintah adalah 11,40

https://ngawikab.bps.go.id

persen (2016); 11,24 persen (2017); 11,00 persen (2018); 11,01 persen (2019); dan 11,20 persen (2020).

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap Rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Ngawi 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah (Juta Rp)					
ADHB	1.884.088,97	1.991.034,84	2.106.159,14	2.249.347,16	2.269.913,16
ADHK 2010	1.268.925,32	1.281.943,47	1.320.143,38	1.365.157,61	1.337.549,50
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	**11,40**	**11,24**	**11,00**	**11,01**	**11,20**
Konsumsi Pemerintah per-Kapita (Juta Rp)					
ADHB	2,27	2,40	2,54	2,71	2,73
ADHK 2010	1,53	1,54	1,59	1,64	1,61
Konsumsi Pemerintah per-Pegawai Pemerintah (Juta Rp)					
ADHB	170,40	191,08	212,81	230,77	248,46
ADHK 2010	114,76	123,03	133,39	140,06	146,40
Pertumbuhan (%)					
Total konsumsi pemerintah	-7,09	1,03	2,98	3,41	-2,02
Konsumsi perkapita	-7,17	0,97	2,96	3,41	-2,03
Konsumsi per-pegawai pemerintah	4,12	7,20	8,42	5,00	4,53
Jumlah Pegawai Pemerintah[2]	**11.057**	**10.420**	**9.897**	**9.747**	**9.136**
Jumlah Penduduk (000 jiwa)	**829,48**	**829,90**	**830,09**	**830,11**	**830,13**

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

[2] Jumlah pegawai pemerintah belum memperhitungkan jumlah pegawai Instansi Pusat dan Provinsi yang bekerja di Wilayah Kabupaten Ngawi Jumlah pegawai yang digunakan pada publikasi ini adalah jumlah pegawai pemerintah daerah Kabupaten Ngawi

Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2016 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 2,27 juta Rupiah, terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu hingga mencapai 2,73 juta Rupiah pada tahun 2020.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya adanya fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan masing-masing senilai 1,53 juta Rupiah (2016); 1,54 juta Rupiah (2017); 1,59 juta Rupiah (2018); 1,64 juta Rupiah (2019) dan 1,61 juta Rupiah (2020).

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2020 pertumbuhannya sebesar -2,02 persen, efek dari berbagai kebijakan terkait pandemi Covid-19. Jumlah pegawai Pemerintah Daerah (tidak termasuk pegawai pemerintah pusat dan provinsi) setiap tahunnya terus berkurang. Selain karena banyaknya pegawai yang pensiun, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor kebijakan penghematan anggaran belanja barang, perjalanan dinas dan rapat pada beberapa tahun terakhir.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 170,40 juta Rupiah, dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2020 nilainya mencapai 248,46 juta Rupiah. Hal ini disebabkan oleh terus menurunnya jumlah pegawai pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi karena jumlah pegawai yang pensiun lebih banyak dibanding pegawai baru.

Pada tingkat harga konstan 2010, indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Persentase pertumbuhan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2016 ke 2017, dimana pada tahun 2017 pengeluaran konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah tumbuh sebesar 7,20 persen sedang pada tahun sebelumnya yaitu 4,12 persen. Percepatan juga terjadi pada 2018, dengan pertumbuhan mencapai 8,42 persen dan pada 2020 kembali melambat hingga ke angka 4,53 persen. Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per

https://ngawikab.bps.go.id

pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik) atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)[3]. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Ngawi 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB (Juta Rp)					
a. ADHB	3.278.478,25	3.927.683,57	4.434.480,32	4.808.569,75	4.641.903,72
b. ADHK 2010	2.341.134,67	2.698.200,04	2.918.414,34	3.076.727,67	2.942.185,86
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	**19,83**	**22,18**	**23,17**	**23,53**	**22,90**
Struktur PMTB					
a. Bangunan					
(Juta Rp)	2.792.895,35	3.406.991,57	3.870.310,00	4.204.483,37	4.042.336,58
Persentase (%)	85,19	86,74	87,28	87,44	87,08
b. Non Bangunan					
(Juta Rp)	485.582,90	520.692,00	564.170,32	604.086,38	599.567,13
Persentase (%)	14,81	13,26	12,72	12,56	12,92
Total PMTB					
(Juta Rp)	3.278.478,25	3.927.683,57	4.434.480,32	4.808.569,75	4.641.903,72
Persentase (%)	100	100	100	100	100
Pertumbuhan (%)					
a. Bangunan	8,19	17,43	8,78	5,43	-4,62
b. Non Bangunan	6,42	3,16	4,25	5,38	-2,75
Total PMTB	7,92	15,25	8,16	5,42	-4,37

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Kontribusi PMTB terhadap perekonomian Kabupaten Ngawi cukup besar. Sumbangan komponen ini berkisar antara 19-23 persen dari total PDRB. Dari sisi

[3] *Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor*

pertumbuhan riil, sepanjang tahun 2016 hingga 2019, PMTB selalu tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 15,25 persen. Namun, pada tahun 2020 kinerja PMTB terhambat oleh merebaknya virus Covid-19 di seluruh wilayah. Hal ini menyebabkan komponen PMTB tumbuh negatif sebesar 4,37 persen.

Ditinjau menurut jenisnya, PMTB dibedakan menjadi 2 jenis aset, yakni bangunan dan non bangunan. Struktur PMTB Kabupaten Ngawi sepanjang tahun 2016 hingga 2020 didominasi oleh PMTB bangunan. Proporsi PMTB bangunan terhadap total PMTB berkisar antara 85-87 persen setiap tahunnya. Kinerja PMTB bangunan tahun 2016 hingga 2019 cukup baik dengan pertumbuhan riil selalu di atas 5 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi tercipta pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 17,43 persen. Pandemi Covid-19 yang melanda Kabupaten Ngawi selama tahun 2020 turut menghambat proses pembangunan beberapa proyek infrastruktur, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Terhambatnya proses konstruksi ini berdampak pada terbatasnya penciptaan asset fisik pada tahun tersebut. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan riil PMTB bangunan mengalami kontraksi mencapai -4,62 persen.

Dalam lima tahun terakhir, PMTB non bangunan memberikan kontribusi sekitar 12-14 persen terhadap ekonomi Kabupaten Ngawi setiap tahunnya. Dalam periode tersebut, pertumbuhan riil PMTB non bangunan setiap tahunnya selalu lebih lambat dibandingkan PMTB bangunan. Pada tahun 2016 hingga 2019, pertumbuhan PMTB non bangunan mampu tumbuh positif, dengan pertumbuhan tertinggi tercipta pada tahun 2016 sebesar 6,42 persen. Kemudian pada tahun 2020, PMTB non bangunan mengalami kontraksi sebesar -2,75 persen. Selama tahun 2020, banyak wilayah membatasi interaksi dengan wilayah luar untuk mencegah penularan virus semakin massif. Terbatasnya interaksi ini turut menghambat pemenuhan barang-barang modal dalam wilayah Kabupaten Ngawi.

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "persediaan" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

https://ngawikabbps.go.id

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen Ekspor Neto antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya.

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Ngawi 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Juta Rp)	47.065,02	47.535,67	50.248,58	51.684,34	24.504,67
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	30.801,75	30.872,60	31.837,23	32.569,66	15.286,95
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	**0,28**	**0,27**	**0,26**	**0,25**	**0,12**

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2016, perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 47.065,02 juta Rupiah, yang kemudian naik pada tahun 2017 hingga tahun 2019, menjadi 47.535,67 juta Rupiah (2017), 50.248,58 juta Rupiah (2018) dan 51.684,34 juta Rupiah (2019). Sedangkan pada tahun 2020 nilainya hanya sebesar 24.504,67 juta Rupiah. Nilai perubahan inventori cenderung stabil hingga tahun 2019 dengan kontribusi terhadap total PDRB sekitar 0,2 persen setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 kontribusi perubahan inventori mengalami penurunan dari 0,25 persen (2019) menjadi 0,12 persen. Penurunan ini didorong oleh pelemahan kegiatan ekonomi Kabupaten Ngawi selama

https://ngawikab.bps.go.id

masa pandemi Covid-19. Terhambatnya pasokan barang, baik dari luar kabupaten dan luar provinsi berdampak pada penurunan nilai perubahan inventori. Selain itu, pemenuhan barang untuk konsumsi domestik dalam dan luar kabupaten juga turut berpengaruh terhadap kondisi perubahan inventori Kabupaten Ngawi sepanjang tahun 2020.

3.2.6. Ekspor Neto

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Ngawi, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Ngawi. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (supply) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Ngawi di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Ngawi terhadap

https://ngawikab.bps.go.id

ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah Kabupaten Ngawi lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Sementara itu ekspor neto adalah selisih antara nilai ekspor dengan impor. Ekspor neto yang positif menunjukkan bahwa ekspor lebih besar daipada impor. Perhitungan ekspor neto dilakukan bila perekonomian melakukan transaksi dengan perekonomian lain, dalam hal perekonomian Kabupaten Ngawi, perekonomian lain mencakup Kabupaten Kota lain baik di dalam atau di luar Provinsi Jawa Timur, maupun dengan luar negeri.

Tabel 14. Perkembangan Ekspor Neto Kabupaten Ngawi 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor Neto					
a. ADHB (Juta Rp)	-635.441,77	-1.149.464,91	-1.333.357,32	-1.523.529,88	-1.367.932,43
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	-699.697,45	-855.997,09	-886.847,70	-874.178,24	-739.781,43
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	**-3,84**	**-6,49**	**-6,97**	**-7,46**	**-6,75**

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

https://ngawikab.bps.go.id

Nilai ekspor neto Kabupaten Ngawi terus mengalami penurunan sejak tahun 2016. Nilai ekspor neto Kabupaten Ngawi atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 hingga 2020 masing-masing adalah -635.441,77 juta Rupiah (2016); -1.149.464,91 juta Rupiah (2017); -1.333.357,32 juta Rupiah (2018); -1.523.529,88 juta Rupiah (2019); dan -1.367.932,43 juta Rupiah (2020). Nilai minus menunjukkan impor barang dan jasa Kabupaten Ngawi lebih besar dibandingkan dengan ekspor.

Pada periode 2016-2020, peranan nilai ekspor dalam angka PDRB Kabupaten Ngawi dapat dikatakan cukup stabil, sementara nilai peranan nilai impor cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan distribusi persentase dari nilai ekspor neto terhadap PDRB Kabupaten Ngawi semakin turun dari tahun ke tahun yakni -3,84 persen (2016); -6,49 persen (2017); -6,97 persen (2018); -7,46 persen (2019); dan -6,75 persen (2020).

https://ngawikab.bps.go.id

4

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN

https://ngawikab.bps.go.id

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT
PDRB PENGELUARAN KABUPATEN NGAWI

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari data PRDB. Berikut akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis ditengah keterbatasan informasi.

4.1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah ekonomi Kabupaten Ngawi yang didalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan. Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

https://ngawikab.bps.go.id

Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Ngawi 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PDRB					
a. ADHB (Juta Rp)	16.529.645,44	17.710.412,32	19.140.125,79	20.432.646,96	20.270.971,90
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	11.807.560,95	12.406.434,85	13.052.301,19	13.710.885,85	13.479.742,47
PDRB per Kapita					
a. ADHB (Juta Rp	21,35	23,06	24,61	24,42	17,43
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	14,96	15,73	16,52	16,24	11,78
Pertumbuhan PDRB per Kapita[9]	**5,12**	**5,02**	**5,18**	**5,04**	**(1,69)**
Jumlah penduduk (000 jiwa)	**829,48**	**829,90**	**830,09**	**830,11**	**830,11**
Pertumbuhan Penduduk (%)	**0,08**	**0,05**	**0,02**	**0,00**	**0,00**

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

[9] *Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010*

4.2. PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 16. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Ngawi 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (Juta Rp ADHB)					
a. Rumahtangga	11.759.276,05	12.687.262,35	13.665.622,54	14.617.209,81	14.468.060,47
b. LNPRT	196.178,93	206.360,81	217.972,54	229.365,78	234.522,32
c. Pemerintah	1.884.088,97	1.991.034,84	2.106.159,14	2.249.347,16	2.269.913,16
Jumlah	**13.839.543,95**	**14.884.657,99**	**15.989.754,21**	**17.095.922,75**	**16.972.495,95**
PDRB ADHB (Juta Rp)	**16.529.645,44**	**17.710.412,32**	**19.140.125,79**	**20.432.646,96**	**20.270.971,90**
Persentase (%)	**83,73**	**84,04**	**83,54**	**83,67**	**83,73**

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

http://ngawikab.bps.go.id

4.3. INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana:

I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 17. ***Incremental Capital Output Ratio*** **(ICOR) Kabupaten Ngawi 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp)	11.807.560,95	12.406.434,85	13.052.301,19	13.710.885,85	13.479.742,47
Perubahan PDRB ADHK (Juta Rp)	584.444,89	598.873,90	645.866,34	658.584,65	-231.143,38
PMTB ADHK 2010 (Juta Rp)	2.341.134,67	2.698.200,04	2.918.414,34	3.076.727,67	2.942.185,86
ICOR	4,01	4,51	4,52	4,67	-12,73

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

https://ngawikab.bps.go.id

https://ngawikab.bps.go.id

PENUTUP

https://ngawikab.bps.go.id

PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2016-2020 dapat menggambarkan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Ngawi pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series dari tahun 2016-2020, sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Setiap parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Ngawi terhadap ekonomi luar daerah.

https://ngawikab.bps.go.id

https://ngawikab.bps.go.id

LAMPIRAN

https://ngawikab.bps.go.id

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Ngawi, 2016-2020

(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	**11.759.276,05**	**12.687.262,35**	**13.665.622,54**	**14.617.209,81**	**14.608.060,47**
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4.072.487,41	4.294.279,11	4.548.115,57	4.799.797,44	4.999.046,81
b. Pakaian dan Alas Kaki	331.455,05	356.379,96	380.044,23	402.826,27	404.329,23
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	1.148.751,59	1.229.586,50	1.314.550,51	1.402.193,86	1.485.828,83
d. Kesehatan & Pendidikan	662.653,60	730.733,55	794.767,11	849.634,40	917.301,20
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3.097.530,43	3.409.213,72	3.761.763,05	4.110.211,58	3.472.758,25
f. Hotel & Restoran	1.854.732,48	2.032.038,31	2.182.654,79	2.327.094,12	2.327.094,12
g. Lainnya	591.665,49	635.031,20	683.727,27	725.452,16	725.452,16
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	**196.178,93**	**206.360,81**	**217.972,54**	**229.365,78**	**234.522,32**
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	**1.884.088,97**	**1.991.034,84**	**2.106.159,14**	**2.249.347,16**	**2.269.913,16**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**3.278.478,25**	**3.927.683,57**	**4.434.480,32**	**4.802.569,75**	**4.641.903,72**
5. Perubahan Inventori	**47.065,02**	**47.535,67**	**50.248,58**	**51.684,34**	**24.504,67**
6. Ekspor Neto	**-635.441,77**	**-1.149.464,91**	**-1.334.357,32**	**-1.523.529,88**	**-1.367.932,43**
Produk Domestik Regional Bruto	**16.529.645,44**	**17.710.412,32**	**19.140.125,79**	**20.432.646,96**	**20.270.971,90**

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

https://ngawikab.bps.go.id

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Ngawi, 2016-2020

(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	**8.731.628,03**	**9.113.937,01**	**9.527.920,62**	**9.965.776,16**	**9.779.428,14**
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2.941.377,65	3.021.208,48	3.113.285,86	3.208.560,37	3.295.012,09
b. Pakaian dan Alas Kaki	249.016,56	259.394,23	270.267,19	282.289,49	279.298,90
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	882.712,42	919.781,99	958.754,39	1.003.551,98	1.039.649,06
d. Kesehatan & Pendidikan	481.744,19	507.413,50	532.351,78	557.277,96	589.568,57
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2.466.120,02	2.623.996,19	2.799.589,43	2.980.051,53	2.595.193,41
f. Hotel & Restoran	1.245.699,06	1.300.864,86	1.355.009,81	1.415.935,42	1.429.194,53
g. Lainnya	464.958,13	481.277,76	498.662,16	518.109,41	551.511,57
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	**134.768,63**	**137.478,83**	**140.833,31**	**144.832,98**	**145.073,45**
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	**1.268.925,32**	**1.281.943,47**	**1.320.143,38**	**1.365.157,61**	**1.337.549,50**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**2.341.134,67**	**2.698.200,04**	**2.918.414,34**	**3.076.727,67**	**2.942.185,86**
5. Perubahan Inventori	**30.801,75**	**30.872,60**	**31.837,23**	**32.569,66**	**15.286,95**
6. Ekspor Neto	**-699.697,45**	**-855.997,09**	**-886.847,70**	**-874.178,24**	**-739.781,43**
Produk Domestik Regional Bruto	**11.807.560,95**	**12.406.434,85**	**13.052.301,19**	**13.710.885,85**	**13.479.742,47**

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

https://ngawikab.bps.go.id

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Ngawi, 2016-2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	**71,14**	**71,64**	**71,40**	**71,54**	**71,37**
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	24,64	24,25	23,76	23,49	24,66
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,01	2,01	1,99	1,97	1,99
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	6,95	6,94	6,87	6,86	7,33
d. Kesehatan & Pendidikan	4,01	4,13	4,15	4,16	4,53
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	18,74	19,25	19,65	20,12	17,13
f. Hotel & Restoran	11,22	11,47	11,40	11,39	11,84
g. Lainnya	3,58	3,59	3,57	3,55	3,89
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	**1,19**	**1,17**	**1,14**	**1,12**	**1,16**
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	**11,40**	**11,24**	**11,00**	**11,01**	**11,20**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**19,83**	**22,18**	**23,17**	**23,53**	**22,90**
5. Perubahan Inventori	**0,28**	**0,27**	**0,26**	**0,25**	**0,12**
6. Ekspor Neto	**-3,84**	**-6,49**	**-6,97**	**-7,46**	**-6,75**
Produk Domestik Regional Bruto	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

https://ngawikab.bps.go.id

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Ngawi, 2016-2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	**4,50**	**4,38**	**4,54**	**4,60**	**-1,87**
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,78	2,71	3,05	3,06	2,69
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,96	4,17	4,19	4,45	-1,06
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	4,10	4,20	4,24	4,67	3,60
d. Kesehatan & Pendidikan	5,03	5,33	4,91	4,68	5,79
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,09	6,40	6,69	6,45	-12,91
f. Hotel & Restoran	5,94	4,43	4,16	4,50	0,94
g. Lainnya	3,49	3,51	3,61	3,90	6,45
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	**-0,46**	**2,01**	**2,44**	**2,84**	**0,17**
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	**-7,09**	**1,03**	**2,98**	**3,41**	**-2,02**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**7,92**	**15,25**	**8,16**	**5,42**	**-4,37**
5. Perubahan Inventori	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. Ekspor Neto	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Produk Domestik Regional Bruto	**5,21**	**5,07**	**5,21**	**5,05**	**-5,05**

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

https://ngawikab.bps.go.id

Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Ngawi, 2016-2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	**134,67**	**139,21**	**143,43**	**146,67**	**147,94**
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	138,46	142,14	146,09	149,59	151,72
b. Pakaian dan Alas Kaki	133,11	137,39	140,62	142,70	144,77
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	130,14	133,68	137,11	139,72	142,92
d. Kesehatan & Pendidikan	137,55	144,01	149,29	152,46	155,59
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	125,60	129,92	134,37	137,92	133,82
f. Hotel & Restoran	148,89	156,21	161,08	164,35	167,88
g. Lainnya	127,25	131,95	137,11	140,02	143,16
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	**145,57**	**150,10**	**154,77**	**158,37**	**161,66**
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	**148,48**	**155,31**	**159,54**	**164,77**	**169,71**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**140,04**	**145,57**	**151,95**	**156,29**	**157,77**
5. Perubahan Inventori	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. Ekspor Neto	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Produk Domestik Regional Bruto	**139,99**	**142,75**	**146,64**	**149,02**	**150,38**

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

https://ngawikab.bps.go.id

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Ngawi, 2016-2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,94	3,37	3,03	2,26	0,87
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,01	2,66	2,78	2,40	1,42
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,32	3,22	2,35	1,48	1,45
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	2,99	2,72	2,56	1,91	2,29
d. Kesehatan & Pendidikan	3,36	4,70	3,67	2,12	2,05
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,77	3,44	3,42	2,65	-2,98
f. Hotel & Restoran	5,14	4,91	3,12	2,03	2,15
g. Lainnya	4,03	3,69	3,91	2,12	2,24
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,66	3,12	3,11	2,32	2,08
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,44	4,60	2,72	3,28	3,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,95	3,95	4,38	2,86	0,95
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Neto	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	**4,78**	**1,97**	**2,72**	**1,63**	**0,91**

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

https://ngawikab.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

https://ngawikab.bps.go.id

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____*Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stock*s, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

https://ngawikab.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NGAWI
Jalan Trunojoyo 64 Ngawi 63217
Telp. (0351) 749177, Fax. (0351) 74977
Hompepage: http://ngawikab.bps.go.id
e-mail: bps3521@bps.go.id

ngawikab.bps.go.id